

LAPORAN
PENELITIAN DASAR KEILMUAN

Judul :

One Man One Vote Versus One Delegation One Vote

(Analisis tentang Kemacetan sistem pemilihan Ketua umum dalam
Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIV tahun 2010)

Oleh :

Drs. Jainuri,MSi

NIP - UMM : 103.9209.0358



Universitas Muhammadiyah Malang
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2011

KATA PENGANTAR

Saya merasa bersyukur kepada Allah SWT, bahwa dengan peertolongannya penelitian yang berjudul : *One Men One Vote Versus Versus One Delegation one Vote* dengan sub judul : (Analisis tentang Kemacetan Sistem pemilihan Ketua Umum Dalam Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIV tahun 2010), telah selesai dilaksanakan.

Urgensi penelitian ini untuk menilir-menelusur : (1). Kontraversi kemacetan pemilihan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah. (2). Kontraversi terjadi karena untuk memenangkan kontestasi beberapa pihak berusaha merubah sistem pemilihan dari *one man one vote* menjadi *one delegation one vote* (3). Perubahan ini, sedikit banyak mengurangi bahkan menafikan peran cabang/daerah untuk memilih ketua umum (4). Proses ini dianggap sebagai wahana pengebirian demokrasi dilingkungan pemuda Muhammadiyah. (5). Jika terjadi, implikasinya Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah khususnya ketua umum kurang memiliki legitimasi yang kuat dihadapan anggota dan struktur dibawahnya.

Dengan selesainya penelitian ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Pemuda Muhammadiyah yang telah membantu penelitian ini terutama pada saat berlangsungnya Muktamar dan muktamar Luar Biasa Pemuda Muhammadiyah di Jakrta, akhirnya peneliti berharap bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Malang, 1 Agustus 2011

Peneliti

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN DASAR KEILMUAN

A. Judul Penelitian : *One Men One Vote Versus One Delegation one Vote*

(Analisis tentang Kemacetan Sistem pemilihan Ketua Umum Dalam
Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIV tahun 2010)

B. Identitas Peneliti

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Ketua peneliti | : Jainuri |
| 2. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 3. Pangkat Golongan | : Penata/IIIc |
| 4. Jabatan | : Lektor |
| 5. NIP UMM | : 103.9209.0346 |
| 6. Fakultas/Jurusan | : Ilmu sosial dan Ilmu politik/ Ilmu Pemerintahan |
| 7. Jumlah peneliti | : 1 Orang |
| Nama Anggota | : - |
| 8. Jangka Waktu | : Delapan bulan |
| C. Sumber Biaya/Besar | : DPP UMM/Rp. 6.000.000,- |

Malang, 1 Agustus 2011

Peneliti,

Drs. Jainuri, Msi

Mengetahui
Dekan Fkip UMM

Dr. Wahyudi, Msi

Menyetujui
Direktur DP2M

Prof. Dr. Bambang Widagdo, MM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
PERPUSTAKAAN PUSAT
JL. RAYA TLOGOMAS Km. 8 Telp. 552318 Malang

**Surat Keterangan / pengesahan
Laporan Hasil Penelitian**

JUDUL : *ONE MEN ONE VOTE VERSUS ONE DELEGATION ONE VOTE (Analisis Tentang Kemacetan Sistem Pemilihan Ketua Umum dalam Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIV tahun 2010)*

PENELITI

Nama : Drs. Jainuri M.Si
NIP : 103.9209.0358
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Telah didokumentasikan sebagai bahan referensi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang pada :

No. Register : *E.66/23/Perpus-UMH/VI/2012*

Tanggal : 26 Juni 2012

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Juni 2012
Kepala Perpustakaan,

Prof. Dr. Dyah Roswitawati, MP

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pengesahan Dari Perpustakaan	iii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORITIK	6
A. Sistem Pemilihan	6
B. <i>Deadlock</i> Pemilihan	8
C. Implikasi Kemacetan Pemilihan Pimpinan	10
BAB III METODE PENELITIAN	11
A. Jenis Penelitian	11
B. Teknik Pengumpulan Data	11
C. Subyek Penelitian	12
D. Teknik Analisa Data	13
BAB IV HASIL PENELITIAN	15
A. Faktor Penentu Kemacetan Muktamar XIV Pemuda Muhammadiyah	15
B. Implikasi Kemacetan Pemilihan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah	29
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47

Abstrak

Koalisi delegasi Jawa Tengah dan delegasi Jawa Timur dalam empat kali muktamar terakhir memenangkan pemilihan ketua umum. Agar peta dominasi atas jumlah delegasi berubah dan ketua umum bisa berasal dari mana saja di seluruh Indonesia, maka sistem pemilihan dan hak memilih ketua umum harus dirubah. Inilah yang menginspirasi beberapa orang Pimpinan Pusat yang diikuti beberapa Pimpinan Wilayah untuk merubah sistem pemilihan dari *one man one vote* menjadi *one delegation one vote*. Perubahan sistem ini berimplikasi komplikasi ditingkat pimpinan dan komplikasi antar pimpinan pusat dengan beberapa pimpinan wilayah- pimpinan wilayah dengan pimpinan daerah. Bahkan kemudian berakhir pada kemacetan pemilihan ketua umum dan formatur dalam Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIV di Jakarta. Urgensi penelitian ini untuk menilir-menelusur : (1). Kontraversi kemacetan pemilihan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah. (2). Kontraversi terjadi karena untuk memenangkan kontestasi beberapa pihak berusaha merubah sistem pemilihan dari *one man one vote* menjadi *one delegation one vote* (3). Perubahan ini, sedikit banyak mengurangi bahkan menafikan peran cabang/daerah untuk memilih ketua umum (4). Proses ini dianggap sebagai wahana pengebirian demokrasi dilingkungan pemuda Muhammadiyah. (5). Jika terjadi, implikasinya Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah khususnya ketua umum kurang memiliki legitimasi yang kuat dihadapan anggota dan struktur dibawahnya. Setelah gagal di Muktamar Jakarta tanggal 19 – 23 Mei 2010 dan gagal pula di pertemuan kandidat, Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2010 di Yogyakarta. Karena itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka menelisik-menelusur tentang sejauh mana efektivitas perubahan sistem pemilihan diatas.

Kata Kunci : Kemacetan, vote, Pemilihan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIV dilaksanakan di Asrama Haji Jakarta pada tanggal 19 - 23 Mei 2010 telah usai diselenggarakan. Hampir semua agenda muktamar telah diselenggarakan dengan baik seperti : Pembukaan, ceramah dan pembekalan oleh elite negara, temu alumni PP Pemuda Muhammadiyah selama lima periode, pameran dan temu bisnis dan lain-lain. Namun ada yang memprihatinkan dalam perhelataan tersebut yakni gagalnya forum memilih ketua umum dan formatur Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Dalam sejarah Muktamar mulai dari yang pertama sampai ke empat belas - baru kali ini organisasi otonom Muhammadiyah ini mengalami kemacetan/*deadlock* memilih pimpinan pusat. Kemacetan ini ditengarai karena aspek-aspek politik praktis sangat mengemuka di ajang pertemuan Pemuda Muhammadiyah se Indonesia itu.

Menjadi elite organisasi kepemudaan seperti Pemuda Muhammadiyah bagi individu tertentu ternyata masih sangat menarik – menarik karena mereka tergiur untuk menjadi atau memiliki posisi dan peran utama dalam struktur komunitas masyarakat tertentu. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Putnam bahwa : “elite merujuk pada suatu kelompok dalam masyarakat yang mempunyai posisi utama dalam struktur masyarakat yang memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat”. (Mas’oed, et.al : 2001). Karena itu, kontestasi menjadi elite pemuda tidak kalah menarik dibanding bersaing untuk berebut menjadi elite partai politik, hal ini tergambar dari besarnya kandidasi dan kuatnya kontestasi di Muktamar

Pemuda Muhammadiyah kali ini.

Ditinjau dari bingkai perkembangan organisasi - kontestasi semacam itu sangat positif – karena ternyata organisasi kader dan organisasi nirlaba semacam Pemuda Muhammadiyah masih banyak diminati oleh mereka yang peduli untuk mengelolanya. Namun menjadi negatif manakala kontestasi dilakukan tanpa menghiraukan aturan main dan kultur yang sudah *given* dibangun sejak lama oleh para pendahulunya. Motivasi apa yang menjadi ekspresi para kandidat untuk bersaing secara ketat berebut ketua umum, dalam dunia elite pemuda sebagaimana juga terjadi di panggung politik seperti yang ditegaskan oleh Varma (2001 : 198) : ”Apa yang mendorong elite politik atau kelompok-kelompok elite untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritis politik (senantiasa) ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik, menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut”. Penegasan diatas memberi nuansa bahwa : (1). ada semacam dorongan kemanusiaan setiap elite selalu berkeinginan untuk meraih kekuasaan. (2). Kekuasaan yang diraih diekspresikan untuk melakukan sosialisasi dan penanaman nilai-nilai. Namun disamping kedua hal tersebut yang lebih penting di dunia elite pemuda Muhammadiyah adalah terjadinya proses perkaderan dan ada jaminan kontinuitas pergantian elite.

Sampai sekarang, meski muktamar banyak mengagendakan hal-hal penting

bagi kemajuan organisasi, umat, masyarakat dan bangsa namun fokus sorotan Muktamirin - lebih banyak kearah persoalan-persoalan mengenai pergantian pimpinan. Biasanya, setahun sebelum - sampai pada saat pelaksanaan muktamar forum-forum seperti : diskusi, seminar, tanwir, debat kandidat dan pelatihan-perkaderan Pemuda Muhammadiyah banyak dihabiskan untuk menggagas tentang pergantian pimpinan dan mencari formula siapa yang layak menjadi kandidat ketua umum(sirkulasi elite). Hariyanto (2005) menjelaskan bahwa sirkulasi elite adalah pergantian elite dari elite lama kepada elite baru yang dilakukan dengan cara paksaan maupun dengan cara-cara demokratis. Karena melalui muktamar, pergantian generasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah harusnya “hanya” dimaknai sebagai sirkulasi elite yang terbuka, demokratis dan damai.

Namun, meski pergantian pimpinan melalui muktamar dilakukan dengan cara-cara : demokratis, terbuka dan damai pada saat tertentu dalam situasi tertentu kadang-kadang yang demokratis dan damai menjadi sedikit *chaos* bahkan *deadlock*. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari akar masalah (sebab) dan mendiskripsikan implikasi (akibat) dari kemacetan pemilihan ketua umum dan formatur Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada Muktamar ke XIV di Jakarta. Karena itu, urgensi penelitian ini untuk menilik-menelusur : (1). Kontraversi kemacetan pemilihan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah. (2). Kontraversi terjadi karena untuk memenangkan kontestasi beberapa pihak berusaha merubah sistem pemilihan dari *one man one vote* menjadi *one delegation one vote* (3). Perubahan ini, sedikit banyak mengurangi bahkan menafikan peran

cabang/daerah untuk memilih ketua umum (4). Proses ini dianggap sebagai wahana pengebirian demokrasi dilingkungan pemuda Muhammadiyah. (5). Jika terjadi, Implikasinya Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah khususnya ketua umum kurang memiliki legitimasi yang kuat dihadapan anggota dan struktur dibawahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut : “faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab *deadlock* pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan apa implikasinya bagi organisasi tersebut”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *deadlock* pemilihan ketua umum dan formatur Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
2. Mengetahui implikasi dari kemacetan pemilihan ketua umum dan formatur Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bagi organisasi tersebut”.

D. Manfaat Penelitian

Dengan mencari akar masalah (sebab) dan mendiskripsikan implikasi (akibat) dari kemacetan pemilihan ketua umum dan formatur Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada Muktamar ke XIV di Jakarta, kemudian dibandingkannya dengan 4 kali pemilihan pimpinan pada muktamar sebelumnya-penelitian ini ingin menilik-menelusur tentang sistem pemilihan di organisasi

otonom Muhammadiyah tersebut. Karena itu, secara akademis kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mampu : (1). Menjelaskan tentang sistem pemilihan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah; (2). mengkomparasikan evolusi sistem pemilihan Pimpinan dari masa ke masa minimal 4 kali periode muktamar. (3). Mendiskripsikan komparasi kebaikan dan kelemahan sistem pemilihan : Satu orang satu suara (*One men one vote*) dengan satu delegasi satu suara (*one delegation one vote*). (4). Menelusur benar-tidaknya tarikan politik yang mempengaruhi proses pemilihan dan bahkan kemacetan pemilihan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada Muktamar ke XIV di Jakarta. (5). Menjelaskan adakah cara lain, untuk menghindari eksekusi negatif dari Muktamar Luar Biasa (MLB) Pemuda Muhammadiyah sebab kemacetan Muktamar berarti bersiap-siap untuk melalui mekanisme seperti MLB.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Sistem Pemilihan

Sistem pemilihan adalah mekanisme dan prosedur atau tata cara yang digunakan untuk memilih pimpinan organisasi (ketua umum dan formatur). Sistem pemilihan seperti ini digunakan dalam ormas, parpol, DPR dan lain sebagainya. Sistem pemilihan dalam organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah tercantun dalam AD/ART yang digunakan untuk mengatur : (1). mekanisme dan prosedur pemilihan Pimpinan (ketua umum dan formatur) - berjenjang dari pusat, wilayah sampai ke Pimpinan Ranting. (2). syarat-syarat calon Pimpinan (ketua umum dan formatur) syarat administratif dan syarat ideologis. (3). Tata – cara pemilihan terpisah antara ketua umum dan formatur. (4). Hak dan kewajiban ketua umum/formatur dalam menyusun kepengurusan. (5). Hak suara dan bicara peserta , peninjau muktamar. Dalam konteks politis untuk memenangkan kandidasi dan kontestasi apa yang tersurat dalam AD/ART itulah yang diterjemahkan dalam bentuk tata-tertib sidang dan tata-tertib pemilihan yang akan diperdebatkan dalam arena Muktamar. Siapa yang jeli dan cerdas menggunakan ini bisa memenangkan pergumulan politik di Pemuda Muhammadiyah. (AD/ART Pemuda Muhammadiyah)

Hak suara (AD/ART), mengatur tentang siapa yang memiliki hak untuk memilih pimpinan. Di Pemuda Muhammadiyah pada hakekatnya terjadi evolusi dalam pengaturan hak suara : pada Muktamar ke XI di Riau 1998 selain Pimpinan pusat, Pimpinan wilayah, dan Pimpinan Daerah semua Pimpinan Cabang

memiliki hak suara untuk memilih Ketua Umum dan formatur namun pada Muktamar XII di Surabaya tahun 2002 dan Muktamar XIII di Samarinda tahun 2006 hak Cabang mulai di batasi - hal ini untuk mengurangi jumlah delegasi dan mengefisiensi pelaksanaan dan anggaran muktamar. Pada Muktamar XIV di Jakarta terjadi lompatan sistem – berdasarkan hasil tanwir Ciloto 2009 – hak suara untuk memilih formatur diserahkan pada peserta muktamar sementara memilih ketua umum diserahkan pada delegasi (jumlah 33 wilayah), pemisahan hak suara pemilihan inilah yang menjadi masalah sehingga terjadi kemacetan.

Dalam Muktamar Jakarta sistem inilah yang populer disebut metode *one men one vote* dan metode *one delegation one vote*. Metode pertama semua peserta muktamar memiliki hak untuk memilih ketua umum dan formatur sementara metode kedua peserta muktamar dibatasi hanya memilih formatur sementara ketua umum dipilih oleh delegasi yakni satu orang yang ditunjuk oleh pimpinan wilayah. Bagi mereka yang tidak setuju dengan metode kedua ini berasumsi bahwa : (1). hanya satu orang pimpinan wilayah yang berhak memilih ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. (2). Delegasi Pimpinan Wilayah yang terdiri Daerah dan Cabang harus menyatukan persepsi tentang siapa yang harus dipilih. (3). Karena intensitas interaksi kandidat dengan pimpinan daerah dan cabang mungkin berbeda dengan intensitas komunikasi kandidat dengan pimpinan wilayah, maka sulit rasanya menyatukan pilihan pimpinan wilayah dengan pimpinan daerah/cabang, kecuali di pimpinan wilayah tertentu. (4). Jika dipaksakan, pimpinan wilayah seperti ini mengundang persoalan dengan pimpinan daerah/cabang yang dipimpinya. (5). Diantara anggota pimpinan wilayah juga

terjadi *conflick of interest* karena masing-masing orang memiliki kedekatan-kedekatan psikologis dengan kandidat, karena itu mereka memiliki pilihan-pilihannya tersendiri.

Sementara mereka yang setuju dengan metode kedua berargumentasi : (1). Sistem pemilihan *one delegation one vote* telah disyahkan setahun yang lalu melalui Tanwir Ciloto – karena itu syah diterapkan di Mukhtar. (2). Memberi kesempatan pimpinan wilayah untuk menyatukan persepsi dengan pimpinan daerah dan cabang untuk memilih ketua umum. (3).Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi kader terbaik diseluruh Indonesia untuk dipilih menjadi ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. (4). Ketua umum adalah representasi Pemuda Muhammadiyah karena itu orang dipilih harus memiliki kualitas-kualitas tertentu seperti : Penguasaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, memiliki akhlak terpuji sebagai pribadi dan pimpinan, menguasai ilmu dan memiliki jaringan yang luas. Karena itu, orang seperti ini harus dipilih oleh orang-orang tertentu yang mengerti tentang akhlak dan pribadi pimpinan yakni salah seorang pimpinan wilayah bukan semua orang/peserta mukhtar. Perdebatan yang bertele-tele di arena mukhtar tentang persoalan inilah yang bikin mukhtar mengalami *deadlock*.

B. *Deadlock* Pemilihan

Di Pemuda Muhammadiyah, *Deadlock* pemilihan adalah terjadinya kemacetan dalam pemilihan ketua umum karena dua pihak yang bersaing tanpa kompromi saling mendesakkan agar sistem pemilihan dilakukan dengan cara *one man one vote* atau *one delegation one vote*. Menilik sejarah mukhtar Pemuda

Muhammadiyah terpilihnya seseorang menjadi ketua umum ditentukan oleh dua hal yakni kapasitas pribadi atau kesolidan delegasi. Terdapat pribadi-pribadi tertentu yang mampu meyakinkan orang perorang dan delegasi untuk memilihnya menjadi ketua umum seperti kasus Dien Syamsuddin di muktamar Palembang tahun 1990 yang berangkat ditopang delegasi DKI,. Sementara Hajriyanto (1994), Imam Ad-Daruqutni (1998), Mukti (2002) dan Izzul (2006) disamping memiliki cukup kapasitas juga memiliki delegasi yang solid. Biasanya dalam muktamar pemuda Muhammadiyah “dimenangkan” oleh delegasi Jawa tengah seperti Hajri, Mukti dan Izzul yang solid menopangnya atau Jawa Timur seperti Imam ad-Daruqudni, karena dua wilayah inilah yang memiliki jumlah perwakilan yang paling banyak. Jika Jawa-tengah solid – calon dari Jawa tengah yang menang, sementara jika Jawa Timur yang solid calon Jawa Timurlah yang memenangkan pemilihan.

Peta dominasi jumlah delegasi inilah yang menginspirasi orang-orang yang berkapasitas di Pemuda Muhammadiyah untuk merubah sistem pemilihan dari *one men one vote* menjadi *one delegation one vote*. Sejauh mana efektivitas perubahan sistem ini, kita lihat perkembangan selanjutnya setelah gagal di Muktamar Jakarta tanggal 19 – 23 Mei 2010 – gagal pula pertemuan Kandidat, Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2010 di Yogyakarta. (Pemuda Muhammadiyah Yogya, 30 Mei 2010)

C. Implikasi Kemacetan Pemilihan Pimpinan

Sistem pemilihan pimpinan Pemuda Muhammadiyah sampai Muktamar ke XIII menggunakan sistem *one men one vote* (satu orang satu suara) yang memberi

kesempatan semua peserta muktamar memiliki hak suara untuk memilih Pimpinan (Ketua dan formatur) telah given dan diterima secara baik selama kurang lebih 78 tahun di pemuda Muhammadiyah. Sementara system *one delegation one vote* (Satu suara satu delegasi) delegasi satu propinsi diwakili satu orang untuk memilih Pimpinan/Ketua Umum di cobakan dalam muktamar kali ini mengandung banyak masalah bahkan berakibat gagalnya muktamar.

Implikasi penyederhanaan mekanisme dan prosedur demokratis pemilihan pimpinan berakibat : kegagalan muktamar, tertundanya pergantian pimpinan berjenjang mulai dari PP sampai ke Ranting. Sementara dari pandangan eksternal – *Trust* eksternal terhadap Pimpinan pemuda Muhammadiyah turun

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang deskriptif yaitu “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggerakkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak”.(Nawawi, 1993 : 63). Peneliti ingin mendiskripsikan tentang fenomena kemacetan pemilihan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tahun 2010. Disamping itu juga menilik-menelusur benar-tidaknya tarikan politik yang mempengaruhi proses pemilihan dan bahkan kemacetan pemilihan pimpinan tersebut. Metode ini, dipadukan dengan studi komparatif “sejenis penelitian diskriptif yang ingin menjawab tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu dalam jangkauan waktu sekarang” (Nawawi, 1985 : 63). Dalam hal ini akan dibandingkan beberapa hal : (1). mengkomparasikan evolusi sistem pemilihan Pimpinan dari masa ke masa minimal 4 kali periode muktamar. (3). Mengkomparasikan kebaikan dan kelemahan sistem pemilihan : Satu orang satu suara (*One men one vote*) dengan satu delegasi satu suara (*one delegation one vote*).

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini digunakan : teknik observasi, teknik komunikasi langsung dan teknik dokumentasi. *Teknik pertama* (observasi), peneliti mendatangi dan mengamati situasi *moment* sebelum, pada saat

pelaksanaan dan bubarnya Muktamar XIV Pemuda Muhammadiyah di Asrama Haji Jakarta pada tanggal 19 -23 Mei 2010 dengan catatan-catatan situasi, kondisi psikologis peserta dan kondisi-kondisi politis yang berubah dibanding tiga kali muktamar sebelumnya yang kebetulan peneliti juga mengikutinya dalam kapasitas yang berbeda. Sementara *teknik kedua* (komunikasi langsung) yang akan digunakan adalah teknik *elite interviewing* (Manheim dan Rich, 1981:134) berupa wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yang dilakukan terhadap orang - orang yang dianggap mengetahui dan mengerti tentang masalah yang dirumuskan. Instrumen yang digunakan sebagai panduan dalam teknik ini adalah daftar wawancara, yang berisikan beberapa pertanyaan yang akan menjaga dan membatasi topik wawancara. *Teknik ketiga* (dokumentasi) secara operasional berupaya mengumpulkan data berdasarkan pada dokumentasi mengenai Muktamar Pemuda Muhammadiyah dari masa kemasa, peneliti memiliki dokumen 4 kali Muktamar yang terdiri dari (1). Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah empat periode. (2). Program Kerja Pemuda Muhammadiyah empat periode. (3). Tata tertib pemilihan Ketua dan Formatur empat periode. Dan, (4). Dokumen-dokumen lain yang berisi tentang seputar Muktamar Pemuda Muhammadiyah baik dari media massa maupun dari delegasi dan tim sukses kandidat ketua.

C. Subyek Penelitian

Penelitian Dasar keilmuan ini tidak menggunakan populasi dan sampel tetapi menggunakan subyek penelitian, adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah : (1). Tiga kandidat ketua umum seperti : Gunawan, Rofiq dan Saleh P

Daulay dan calon formatur seperti Makmun murod. (2). Tim sukses Kandidat dan (3). Beberapa orang delegasi yang menjadi peserta Muktamar dari Jatim. (4). Pengamat masalah kepemudaan Chaidir Arief.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data yang di dapat dari wawancara dan sejumlah dokumen. Data yang didapat, dibuat dalam bentuk laporan deskripsi yang berisi narasi kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan fenomena kemacetan pemilihan Ketua Umum dan formatur Pimpinan Pusat pemuda Muhammadiyah ke XIV tahun 2010 di Jakarta, biasanya analisa kualitatif ini meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data diatas yang menggunakan analisis kualitatif (Moleong : 2002, 248) dilakukan dengan proses yang berjalan menurut Faisal (1999 : 33) sebagai berikut :

- a. *Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan (reduksi data), dalam bentuk laporan yang rinci, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya dapat ditelusuri.*
- b. *Mengkodekan data, memberikan nilai-nilai, mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.*
- c. *Menganalisis dan menginterpretasikan data, berfikir dengan jalan membuat kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, serta membuat temuan-temuan umum.*

Pada akhirnya proses analisa data kualitatif dilakukan dalam tiga tahap : induksi – interpretasi – konseptualisasi, Hamidi (2004 :37) proses ini jelaskan sebagai berikut :

- a. *Data atau informasi yang diperoleh dikumpulkan dan kemudian diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok atau pengelompokan data (induksi)*
- b. *Data-data tersebut kemudian dianalisa dan diinterpretasikan untuk ditarik kesimpulan atas masalah yang diteliti (interpretasi)*
- c. *Membuat kesimpulan terhadap hasil analisa berkenaan dengan judul penelitian berdasarkan data yang diperoleh (konseptualisasi).*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penentu Kemacetan Muktamar Ke XIV Pemuda Muhammadiyah.

1. Suasana Muktamar : Mirip Dengan Konggres Partai Politik

Suasana Muktamar ke XIV Pemuda Muhammadiyah di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta tahun 2010, tak ubahnya seperti perhelatan kongres partai politik. Masuk ke arena peserta disuguhi berbagai spanduk dan baliho kandidat serta berbagai ucapan selamat sampai pada slogan, jargon dan marketing politik para kandidat yang terpampang diberbagai sudut arena muktamar. Semua itu dilakukan untuk menawarkan diri supaya dipilih oleh peserta sebagai Ketua Umum dan formatur. Berbagai macam pose kandidat seperti bersanding dengan Ketua Umum Muhammadiyah Dien Syamsuddin, yang lain bersanding dengan beberapa tokoh Muhammadiyah yang terkenal seperti Amien Rais. Nuansa seperti ini tidak biasa dalam lingkungan Muhammadiyah – sementara dilingkungan Pemuda Muhammadiyah lambat-lambat sudah agak kentara ketika muktamar ke XII di Surabaya tahun 2002 dan Muktamar ke XIII di Samarinda tahun 2006 yang lalu. Karena itu tidak heran jika Perhelatan muktamar kali ini suasana penuh nuansa politis dan kontestasi. Situs yang dikelola Muhammadiyah menggambarkan suasana Muktamar seperti berikut ini :

“Suasana Kompleks Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur menjelang proses pemilihan Ketua Umum dan Anggota Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 2010 – 2014 terus memanas. Setelah disyahkannya kandidat dalam siding tanwir, Rabu lalu, Sabtu malam ini (22/05/2010) pergerakan tim sukses para kandidat terus menunjukkan peningkatan, mulai dari pemasangan spanduk dan baliho, penyebaran selebaran dan

buku-buku berisi visi, misi dan profil kandidat dan lobi-lobi yang intens dilakukan di berbagai sudut kompleks. Kandidat Ketua Umum Pantja Nurwahidin mesosialisasikan dirinya dengan memasang spanduk dan poster diberbagai sudut arena Muktamar. Kandidat dari Sulawesi Selatan ini mencoba mensosialisasikan diri kepada para Muktamirin dengan memasang foto diri berukuran besar berdampingan dengan foto Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. (www.muhammadiyah.or.id)

Pada umumnya *marketing politik* yang dilakukan oleh para kandidat untuk menawarkan diri menjadi pimpinan sangat variatif, secara garis besar antara lain dilakukan dengan cara :

- Memasang spanduk/banner diarena muktamar baik calon ketua umum maupun formatur.
- Edarkan buku saku/famlet kepada peserta muktamar seperti yang dilakukan oleh : (a). Gunawan Hidayat dengan judul :”Revitalisasi Peran Pemuda Muhammadiyah,(b). Piet H Khaidir dengan judul : “Kembalikan Pemuda Muhammadiyah ke khittahnya.
- Penyampaian visi dan misi di forum muktamar
- Tampil sebagai pendamping pembicara.
- Lobby kepada delegasi PWPM dan PDPM.
- Aksi simpatik dengan datang ke penginapan peserta diantar tim sukses.
- Fasilitasi delegasi dengan menjanjikan ongkos balik ke daerah-wilayah masing - masing.
- Menerjunkan tim sukses ke perorangan atau delegasi.
- Karantina peserta dan pimpinan delegasi untuk menggodok calon ketua dan formatur.
- Membentuk tim bayangan kepemimpinan pemuda Muhammadiyah periode 2010-2014 dengan mengakomodasi kepentingan wilayah dan daerah tertentu.

Menurut pengamatan peneliti dalam kandidasi dan kontestasi di muktamar Pemuda Muhammadiyah kali ini juga terjadi pertarungan politik - karena masing -masing kandidat berasal atau setidaknya-tidaknya berafiliasi kepada partai tertentu. Rofiq misalnya adalah sekretaris PMB, Gunawan aktivis Golkar, Sholeh dan Piet

H Khaidir disuport oleh PAN dan lain sebagainya. Tentang hal ini para muktamirin merespon dengan sikap yang beragam ada yang pro ada pula yang kontra - ada yang mengatakan wajar ada pula yang beranggapan itu sesuatu yang tidak wajar. Pro dan wajar karena muktamirin berasumsi bahwa elite Pemuda Muhammadiyah karena pendidikan, umur, afiliasi dan pemahamannya tentang tri dimensi kader sudah seharusnya memang dekat dengan persoalan-persoalan politik. Pengamat Politik Islam Bachtiar Effendi di Jakarta kepada inilah.Com mengatakan : “tidak ada persoalan jika para kandidat memiliki hubungan dengan partai politik. Apalagi, kader Muhammadiyah banyak yang bertebaran di sejumlah partai politik. Wajar kalau elit mendukung para calon Ketua Pemuda Muhammadiyah,” (Kamis 20/5/2010). Sementara yang kontra dan tidak wajar beranggapan bahwa elite Pemuda Muhammadiyah yang dekat dengan politik atau berafiliasi kepada partai politik di khawatirkan akan membawa-bawa Pemuda Muhammadiyah secara organisatoris ke arena politik praktis.

Tentang kedekatan elite Pemuda Muhammadiyah dengan politik dan partai politik pengamat masalah kepemudaan Chaidir Arief di arena Mukhtar kepada peneliti mengatakan : “Organisasi pemuda seharusnya menjadi organisasi yang menyiapkan calon pemimpin bangsa, kepengurusan yang akan datang, harus mampu tidak hanya membawa organisasi ini menjadi besar tapi juga mampu menjadi pemasok pelaku politik riil yang kredibel, berintegritas dan kapabel” (komunikasi pribadi, 23 Mei 2010). Artinya bagi Chaidir ternyata elite Pemuda sudah sewajarnya dekat dengan politik bahkan menurutnya pemuda Muhammadiyah harus menjadi pemasok politik riil.

Sementara Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Hajriyanto Y. Thohari mengatakan : “Pemuda Muhammadiyah memiliki tri dimensi kader yakni : kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa karena itu mereka secara integral bergerak ditiga lapangan utama yakni ; persyarikatan, keumatan dan bangsa. Integral maksudnya pribadi pemuda Muhammadiyah pada saat terjun diarena kebangsaan pada saat yang sama dia adalah kader umat dan membawa nilai-nilai yang diperolehnya dari persyarikatan”. (temu alumni, 23 Mei 2010). Karena itu kedekatan elite pemuda Muhammadiyah di arena politik dan kebangsaan menurutnya adalah suatu keniscayaan.

Chaidir Arief menambahkan bahwa : “Tahun 2014 nanti adalah tahun transisi politik dan kekuasaan - pada jaman itu dibutuhkan pemimpin yang mulai saat ini telah memiliki kemampuan pribadi - kematangan intelektual, keluasan jaringan dan mampu menciptakan isu, mengembangkan isu dan penguatan isu jadi jangan memilih pimpinan karena pertimbangan emosional semata”. (komunikasi pribadi 23 Mei 2010). Karena itu sebetulnya, kandidasi - kontestasi di forum muktamar Pemuda Muhammadiyah meski situasinya seperti kongres partai politik – hal ini – bagi elite Pemuda Muhammadiyah merupakan wahana untuk melatih diri dan upaya membiasakan diri agar menjadi elite bangsa di masa depan. Maka ketika muktamar Pemuda Muhammadiyah menyerupai kongres partai politik untuk sebagian besar muktamirin itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa – manakala kemudian terjadi *deadlock* dalam pemilihan ketua itu perkara lain yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Namun demikian – bagi mereka yang tak begitu setuju dengan suasana muktamar Pemuda Muhammadiyah yang mirip

dengan kongres partai politik tentu juga bisa kita fahami - mereka ingin muktamar Pemuda Muhammadiyah harusnya sejuk, dingin tanpa gejolak yang berarti bahkan tidak perlu *deadlock*.

Situasi kandidasi Pemuda Muhammadiyah yang mirip dengan kongres partai dapat diketahui dari arena muktamar - Salah seorang kandidat ketua umum Pemuda Muhammadiyah – Saleh P. Daulay - ketika peneliti berkomunikasi pribadi dengannya, peneliti menanyakan tentang apa kunci sukses Saleh dipilih menjadi Ketum Pemuda Muhammadiyah ia menjawab : “membentuk tim sukses dan menggerakkannya agar peserta banyak memilihnya sebagai ketua umum untuk mengalahkan empat orang saingannya”. (wawancara, 31 Oktober 2010). Jadi kalau kondisi sudah sedemikian rupa apa bedanya Pemuda Muhammadiyah dengan Parpol karena untuk menjadi elite Pemuda Muhammadiyah diperlukan menggerakkan tim sukses.

2. Perubahan sistem pemilihan : Lompatan Yang Tak Terukur

Dalam dinamika pimpinan Pemuda Muhammadiyah sejak berdirinya sampai sekarang dikenal adanya evolusi perkembangan sistem pemilihan pimpinan. Adapun evolusi sistem pemilihan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dari muktamar ke muktamar adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan Ketua dan anggota formatur satu paket pemilihan - yang memilih seluruh peserta muktamar terdiri dari PCPM, PDPM, PWPM dan PPPM - yang mendapat suara terbanyak otomatis menjadi ketua formatur sekaligus ketua umum.

- b. Pemilihan Ketua umum dan anggota formatur secara terpisah, dalam pemilihan ketua umum - yang mendapat suara terbanyak otomatis menjadi ketua formatur sekaligus menjadi ketua umum. Yang memilih seluruh peserta muktamar terdiri dari : PCPM, PDPM, PWPM dan PPPM.
- c. Pemilihan Ketua dan anggota formatur terpisah, yang mendapat suara terbanyak otomatis menjadi ketua formatur sekaligus ketua umum. Yang menjadi peserta muktamar dibatasi (Ketua dan 3 orang dari PDPM , Ketua dan 4 orang dari PWPM dan PPPM)
- d. Pemilihan Ketua dan anggota formatur terpisah, Pemilihan Ketua Umum oleh 33 delegasi wilayah dan 1delegasi PP Pemuda Muhammadiyah sementaraa formatur dipilih oleh peserta muktamar (Ketua dan 3 orang dari PDPM , Ketua dan 4 orang dari PWPM dan PPPM)

Sampai Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIII di Samarinda tahun 2006, Ketua dan Formatur di pilih oleh seluruh anggota/peserta Muktamar yang sering disebut *one men one vote* - Sementara Dalam Muktamar kali ini terjadi lompatan yang terlalu jauh - formatur di pilih oleh peserta muktamar sekitar 2000 orang sementara ketua dipilih oleh perwakilan delegasi wilayah berjumlah 33 orang/delegasi dan 1 delegasi PPPM – yang sering disebut sistem pemilihan *one delegation one vote*. Pertanyaannya kemudian adalah - mengapa sistem pemilihan formatur dan ketua umum harus dibedakan. Motivasi dan esensi apa yang melatar belakangi pembedaan sistem pemilihan tersebut. Menurut hipotesis peneliti terdapat tiga alternatif esensi dan motivasi terhadap perubahan sistem pemilihan itu, yakni : (1). Perubahan sistem pemilihan dimaksudkan untuk menyederhanakan

sistem dan mekanisme pemilihan. (2). Perubahan sistem pemilihan adalah untuk - efisiensi anggaran muktamar, karena yang hadir terbatas atau dibatasi. (3). Perubahan sistem pemilihan – bagi “orang-orang tertentu” di elite Pemuda Muhammadiyah adalah untuk memenangkan kontestasi. Pencermatan peneliti di arena muktamar - dari ketiga alternatif tersebut - motivasi perubahan sistem pemilihan di Pemuda Muhammadiyah adalah untuk memuluskan jalan memenangkan kontestasi – perubahan sistem ini yang dikenal dengan penggunaan AD/ART Versi Tanwir III Ciloto - Bogor.

Bisakah kita menyalahkan forum tanwir Ciloto tahun 2009 yang mengesahkan perubahan sistem pemilihan dari *one men one vote* menjadi *one delegation one vote*, tentu disini bukan forumnya untuk menyalahkan dan menggugat tanwir dan hasil-hasil yang diputuskannya - namun yang lebih penting dalam konteks ini adalah bisakah kita menelaah apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan hasil Tanwir III ciloto - Bogor terdapat perubahan mendasar berkenaan dengan ART Pemuda Muhammadiyah yaitu :

(a). BAB V : PERMUSYAWARATAN, PASAL 19 tentang Cara Pemilihan Pimpinan: ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih oleh 1 (satu) utusan Pimpinan Wilayah dan 1 (satu) utusan Pimpinan Pusat; Ketua Pimpinan Wilayah dipilih 1 (satu) utusan Pimpinan Daerah dan 1 (satu) utusan Pimpinan Wilayah; Ketua Pimpinan Daerah dipilih 1 (satu) utusan Pimpinan Cabang dan 1 (satu) utusan Pimpinan Daerah; Ketua Pimpinan Cabang dipilih 1 (satu) utusan Pimpinan Ranting dan 1 (satu) utusan Pimpinan Cabang; dan Ketua Pimpinan Ranting dipilih oleh anggota di Rantingnya.

(b). Ayat 6 tentang Peserta Mukhtamar, disebutkan :

a. Anggota Mukhtamar terdiri dari :

- 1) Anggota Pimpinan Pusat;
- 2) Ketua dan 4 orang Anggota Pimpinan Wilayah
- 3) Ketua dan 3 anggota Pimpinan Daerah

b. Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah

c. Undangan Pimpinan Pusat

(c). Ayat 7 tentang Hak berbicara dan Hak Suara :

a. Setiap anggota Mukhtamar berhak menyatakan pendapatnya dan berhak satu suara

b. Selain anggota Mukhtamar yang menjadi peserta, berhak menyatakan pendapat tetapi tidak mempunyai hak suara

Dari ketiga hal penting diatas dapat Analisis sebagai berikut : (a). Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat menurut ART pasal 19 hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang perwakilan wilayah dan 1 orang dari PPPM. Ini artinya ketua hanya dipilih oleh 34 orang saja yang terdiri 33 orang pemilih dari delegasi PWPM dan 1 orang dari PPPM. Ini tentu bertentangan dengan substansi dari teks AD Bab V, pasal 10 ayat 1, bahwa Pimpinan Daerah adalah salah satu anggota Mukhtamar untuk membicarakan AD dan ART, pemilihan dan pemberhentian pimpinan dan program satu periode masa jabatan yang memiliki HAK BICARA dan HAK SUARA. Jadi yang boleh memilih ketua umum bukan hanya wakil/delegasi dari pimpinan wilayah (*one delegation one vote*) namun seluruh peserta mukhtamar termasuk juga pimpinan daerah (*one men one vote*).

Dalam prakteknya pasal 19 diatas sulit diterapkan ditingkat bawah contohnya

kota Batu Malang – untuk memilih ketua PDPM di kota ini hanya dilakukan oleh empat orang yakni satu dari PDPM dan tiga wakil dari cabang, sementara ranting tidak memiliki hak untuk memilih ketua PDPM kota Batu. Begitu juga berlaku bagi Kota Mojokerto dan Kota Blitar yang masing-masing memiliki 2 kecamatan untuk memilih Ketua umum PDPM cukup dipilih oleh 3 orang, tentu ini kurang representatif.

(b). Karena itu, Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke 14 yang menggunakan AD/ART produk Tanwir III Ciloto sebenarnya meniadakan eksistensi peran dan realitas sejarah Pimpinan Daerah dalam dinamika gerakan Pemuda Muhammadiyah. Dengan memperhatikan hal tersebut - jelas bahwa secara prinsip konstitusional, perubahan atas ART pasal 19 bertentangan dengan Anggaran Dasar yang kedudukannya lebih tinggi.

(c). Keinginan kuat untuk kembali kepada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdahulu (hasil Tanwir I Batam) bahwa Ketua Umum dipilih oleh seluruh anggota muktamar sebagaimana pemilihan anggota formatur begitu menguat, artinya kembali ke sistem pemilihan *one men one vote* adalah dir kursus yang selalu menjadi perdebatan sepanjang tahun 2009 -2010, setahun sebelum muktamar dilaksanakan – terutama dilakukan oleh delegasi besar seperti Jawa Timur, Jawa tengah dan Jawa Barat. Seorang Aktivis Pemuda Muhammadiyah dalam tulisannya merespon negatif tentang AD/ART hasil Tanwir Ciloto - ia mengatakan : “Pemuda Muhammadiyah kini memasuki era sejarah yang membingungkan. Logika yang meloncat-loncat, bahkan mundur dengan sasaran yang tidak jelas. Betapa tidak, dari sudut usia cukuplah matang, dari dinamika

cukuplah eksistensinya. Namun demikian Tanwir III Bogor telah menjatuhkan citra dan icon dirinya mundur ke belakang”. (23 Mei 2010). Tanggapan negatif demikian banyak dilakukan oleh anggota dan pimpinan ditingkat bawah - harapannya dalam muktamar nanti AD/ART yang digunakan adalah AD/ART produk Tanwir I di Batam bukan AD/ART versi Tanwir III Ciloto

Sementara tentang Ketua umum - selanjutnya ia mengatakan : “Ketua umum adalah simbol sekaligus wujud harapan suara para anggota yang berbasis di daerah, sehigga penghilangan hak pilih utusan daerah adalah sungguh bentuk korupsi hak-hak konstitusional”. Inilah respon yang cukup keras terhadap hasil Tanwir III Ciloto yang menganggap bahwa penghilangan hak suara daerah merupakan korupsi terhadap hak-hak konstitusional.

Kesimpulannya AD/ART Pemuda Muhammadiyah Versi Tanwir III di Ciloto adalah produk perubahan sistem pemilihan yang tak terukur, tidak evolusioner, dan bahkan tidak aspiratif sarat dengan kepentingan politis - karena itu banyak ditentang oleh peserta Muktamar ke XIV di Jakarta sampai kemudian Muktamar harus *deadlock* - bubar dan tak berhasil memilih Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2010 – 2014.



Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIV : Ricuh-Gaduh dan *deadlock*.

Tentang *deadlock* di Muktamar Pemuda Muhammadiyah media massa -
Republika memberitakan sebagai berikut :

Persoalan yang menjadi pemicu deadlock-nya muktamar tersebut karena forum terbelah ke dalam dua arah pemahaman yang berbeda. Satu kelompok menginginkan agar dalam pemilihan menggunakan sistem 'one man one vote' atau satu orang satu suara. Sementara kelompok lainnya menginginkan sistem 'one man one delegation', yakni menginginkan satu delegasi satu suara. Namun, peserta forum menolak sistem 'one man one delegation' yang berarti, masing-masing wilayah hanya punya satu suara. Sementara peserta perwakilan daerah tidak memiliki suara. "Deadlock, sudah tidak bisa dilanjutkan karena forum tidak sepakat dalam sistem pemilihan," kata Rosyidi, salah satu peserta asal Pamekasan, Jawa Timur, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Ahad (23/5/2010)

3. Kandidasi & Kontestasi : Kemandirian Problem Pemuda Muhammadiyah

Kemandirian adalah problem utama elit Pemuda Muhammadiyah, haruskah dalam mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah mereka meminta pertolongan seseorang atau partai politik tertentu. Karena seperti yang beredar issue-issue diarena muktamar bahwa beberapa calon ketua umum Pemuda Muhammadiyah dalam kandidasi memerlukan *support* dari partai politik tertentu – jika ini yang terjadi sungguh tragis nasib organisasi otonom Muhammadiyah ini sebab dalam menegakkan kepemimpinan masih memerlukan bantuan organisasi lain. Dalam konteks inilah Chaidir Arief seorang pengamat kepemudaan menyoroti : “Bagaimana akan mampu menggerakkan organisasi jika untuk menggerakkan diri sendiri saja masih sangat bergantung pada orang lain, bagaimana akan mampu menggerakkan potensi bangsa jika untuk menggerakkan dan mendinamisir organisasi sendiri saja masih kesulitan”. (komunikasi pribadi, 22 Mei 2010)

Kekhawatiran adanya intervensi dalam muktamar Pemuda Muhammadiyah juga menjadi konstataasi ketua umum PP Muhammadiyah, hal ini bisa dicermati dari pernyataannya *di opening ceremony* muktamar. Dalam sambutannya Din secara tegas menyatakan bahwa : “untuk mewujudkan kemandirian bangsa maka perlu kemandirian organisasi terlebih dahulu dan syarat mutlak untuk mewujudkan kemandirian organisasi dibutuhkan pemimpin organisasi yang bukan antek kekuatan politik penguasa. Pemimpin yang bukan antek politik penguasa dicirikan dengan sikap tidak takut serta tunduk kepada penguasa”. (Kabar Arena, Edisi 1/1/XIV/10). Apa yang disampaikan Ketua umum Muhammadiyah tersebut sekaligus adalah himbauan moral agar Pemuda Muhammadiyah tetap menjaga jatidiri sebagai organisasi yang mandiri dalam menentukan kebijakan dan kepemimpinan.

Syarat menjadi pemimpin disamping memiliki kemandirian sekaligus juga bersedia untuk bekerjasama sebab dengan kemandirian dan kerjasama ia dan organisasi yang dipimpinnya tidak mudah di setir orang lain. Karena itu Chaidir Arief sekali lagi mengatakan : “Apakah para calon ketua umum itu sudah memiliki semua potensi yang saya sebutkan tadi jika belum maka perlu melakukan distribusi kekuasaan untuk saling melengkapi dan menguatkan... jangan jalan sendiri...sendiri ...bravo pemuda Muhammadiyah”. (Komunikasi pribadi, 22 Mei 2010).

Bagaimana campur tangan pemerintah dan parpol terhadap Pemuda Muhammadiyah apakah ada atau hanya issu belaka, berikut ini contoh berita media massa tentang intervensi partai politik tertentu di Muktamar Pemuda

Muhammadiyah :

Suasana Muktamar XIV Pemuda Muhammadiyah hari ke ketiga, Sabtu (22/05/2010) memanas. Ditengah agenda pembahasan Program Kerja, Perubahan Anggaran Dasar dan Rekomendasi Muktamar muncul pernyataan dari Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWPM DIY) yang menyesalkan adanya intervensi partai poliitik untuk memilih formatur tertentu. Arif Mahfud, ketua PWPM DIY menyatakan bahwa sore ini ada anggota delegasi DIY yang ditelpon oleh seorang fungsionaris partai politik yang meminta delegasi DIY untuk memilih calon anggota pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah berlatar belakang partai tersebut. “Kami menyesalkan tindakan PAN yang mengintervensi Muktamar ini, terutama intimidasi kader PAN untuk memilih anggota formatur, intervensi tersebut harus dimaknai sebagai tindakan yang melawan Muhammadiyah” demikian Arif Mahfud mengatakan. (22-5-2010)

Dan saya kira tidak hanya partai yang disebut diatas yang berkepentingan untuk melakukan *support* terhadap calon ketua umum Pemuda Muhammadiyah, beberapa partai juga melakukan hal yang sama. Namun yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana respon kelompok elite Pemuda Muhammadiyah menghadapinya. Analisis mengenai campur tangan pemerintah dan partai politik terhadap Pemuda Muhammadiyah dideskripsikan sebagai berikut : (1). Sebenarnya dengan memiliki konsep kepemimpinan kolektif kolegial di Pemuda Muhammadiyah tidak perlu khawatir adanya intervensi dari parpol atau pemerintah. Karena konsep kepemimpinan ini menepis adanya campur tangan pihak eksternal terhadap Pemuda Muhammadiyah dalam membuat keputusan atau kebijakan organisasi – bukankah setiap keputusan organisasi Pemuda Muhammadiyah selalu berpatokan pada kolektif kolegial – jika ada seseorang apakah ketua maupun jajaran pimpinan lainnya secara perorangan membuat keputusan bukan dilakukan secara kolektif hal tersebut tidak dianggap sebagai

keputusan organisasi tetapi merupakan keputusan pribadi yang tak ada sangkut pautnya dengan organisasi. (2). Orang perorang pimpinan Pemuda Muhammadiyah memiliki afiliasi politik yang beragam seperti Gunawan di Golkar, Ahmad Rofiq di PMB, Piet Khaidir di PAN karena itu sulit bagi parpol tertentu mengintervensi Pemuda Muhammadiyah – karena jika ada campurtangan parpol masing-masing eksponen Pemuda Muhammadiyah akan saling mengontrol dan mengkritisi. (3). Selama ini yang terjadi bukan intervensi parpol/pemerintah kepada Pemuda Muhammadiyah namun yang terjadi adalah justru sebaliknya - eksponen Pemuda Muhammadiyahlah yang mengundang atau meminta bantuan parpol dan pemerintah. Jadi agak tidak tepat jika pemerintah dan parpol mengintervensi Pemuda Muhammadiyah karena sebetulnya beberapa elite Pemuda Muhammadiyah yang mengundang, meminta fasilitas dan menjadikan parpol sebagai *networking* dalam menjalin kerjasama dan bahkan untuk media meniti karier politik.

Karena itu, kemandirian Pemuda Muhammadiyah bukan ditentukan oleh sejauhmana campurtangan parpol dan pemerintah – namun yang paling penting adalah bagaimana elite Pemuda Muhammadiyah memanfaatkan bantuan dan kerjasama pihak eksternal untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi Pemuda Muhammadiyah dan membawa organisasi yang dipimpinnya agar menjadi lebih mandiri dalam menjalankan aktivitas dan membuat keputusan. Sesungguhnya campurtangan parpol dan pemerintah – bisa ditepis dengan prinsip dan berlakunya kepemimpinan yang kolektif kolegial.



Perdebatan : Sistem Pemilihan *one men one vote* atau *one delegation one vote*.



Peserta berkeinginan untuk memilih ketua bukan hanya memilih formatur.

B. Implikasi Kemacetan Pemilihan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah

1. Muktamar Bubar : Pimpinan Pusat Tak Terpilih

Baru kali ini Pemuda Muhammadiyah mengalami kegagalan setelah selama kurang lebih 70 tahun tidak pernah *deadlock* dalam pemilihan ketua umum. Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIV di Jakarta – Gagal – kalau toh tidak mau dikatakan gagal total yang paling kelihatan adalah gagal tidak terpilihnya ketua dan anggota formatur yang bertugas menyusun kepengurusan Pimpinan Pusat

Pemuda Muhammadiyah periode 2010 – 2014. Para muktamirin dan media massa mengatakan bahwa baru kali ini Pemuda Muhammadiyah mengalami kegagalan dalam memilih pimpinan sementara Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin menepis kegagalan dengan mengatakan bahwa : “muktamar tidak gagal hampir semua agenda terlaksana dengan baik kecuali pemilihan ketua dan formatur pimpinan pusat periode 2010 – 2014”. (Republika, 24 Mei 2010).

Apa yang menyebabkan Muktamar gagal, menurut pengamatan peneliti kegagalan itu disebabkan karena : (a). Terlalu banyak agenda terutama ceramah yang di lakukan oleh elite negara, sehingga muktamar berlangsung bertele-tele tidak focus. (b). Penempatan agenda acara pemilihan pimpinan yang tidak tepat – Pemilihan diletakkan diakhir acara sehingga ketika berdebatan tentang sistem pemilihan bertele-tele tidak bisa dikompromikan dengan baik - sementara waktu juga berlangsung sampai subuh dan ketika kemudian di sekores untuk kemudian dilanjutkan setelah subuh banyak peserta yang keburu pulang ke daerahnya masing-masing. (c). Perubahan sistem pemilihan dari *one men one vote* menjadi *one delegation one vote*, membikin peserta muktamar merasa tidak diikutsertakan dalam memilih ketua umum, padahal mereka peserta muktamar yang datang jauh-jauh dengan menghabiskan banyak tenaga, energi, waktu dan finansial.

Bagaimana status kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah manakala pimpinan baru belum terbentuk karena gagal di Muktamar, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah - Izzul Muslimin menjelaskan :

“bahwa status Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tidak kosong pasca belum terpilihnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada Muktamar XIV di Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Karena di Muhammadiyah, termasuk Pemuda

Muhammadiyah tidak dikenal istilah Pimpinan Demisioner”.
(Media,23/5/2010).

Jadi selagi pimpinan baru belum terbentuk pimpinan lama tetap menjalankan tugas kewajiban kepemimpinan sampai nanti serah terima dengan pengurus baru.

Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang gagal menyisakan banyak persoalan antara lain : (a). Persoalan akuntabilitas-yakni bagaimana para peserta muktamar mempertanggungjawabkan kondisi ini ke daerahnya masing-masing – sebab kehadiran mereka ke Jakarta mengikuti muktamar pasti dibarengi dengan meminta bantuan finansial ke berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, jadi apa yang harus dilaporkan. (b). Persoalan struktur – yakni bagaimana selanjutnya cara memilih ketua umum dan formatur yang tugasnya menyusun kepengurusan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2010-2014 melalui mekanisme muktamar lanjutan atau muktamar luar biasa. (c). Persoalan kepercayaan (*trust*) – yakni persoalan bagaimana respon kepercayaan pihak eksternal (pemerintah, masyarakat, parpol, dunia kerja, media massa) kepada Pemuda Muhammadiyah.

Apa yang dilakukan Izzul dan teman-temannya untuk segera terbentuknya pengurus - mereka melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di media massa diberitakan sebagai berikut :

“pertemuan di Yogyakarta tanggal 29 mei 2010 yang merupakan hasil rapat konsultasi antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Perwakilan Pimpinan Wilayah pada Ahad Siang, diharapkan akan segera terjadi proses pemilihan, dan menurut Izul bukan Muktamar luar biasa atau Muktamar Lanjutan. Izul berharap persoalan dan masalah ini bisa dituntaskan paling tidak sebelum atau berdekatan dengan Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta awal Juli nanti “Supaya hasil Muktamar XIV ini tidak menjadi ganjalan, atau membuat ketidak nyamanan bagi Muktamar Muhammadiyah”.

Sayangnya hasil rapat konsultasi tersebut juga tidak menyelesaikan masalah, karena masih terjadi dua kubu yang semakin mengeras untuk ingin mempertahankan konsep pemilihan : *one men one vote* atau *one delegation one vote*.

Dari uraian diatas dapat di konklusikan bahwa Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIV di Jakarta gagal karena tidak mampu memilih ketua umum dan formatur yang tugasnya menyusun Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2010 – 2014, karena belum terbentuk pimpinan baru maka kepemimpinan tetap dipegang oleh Izzul Muslimin dan teman-temannya sampai terbentuk pengurus baru dan kemudian serah terima jabatan ketua umum.

Dalam perhelatan muktamar kali ini, aktivis yang pernah mendapatkan “celupan perkaderan” di Malang (UMM, IMM, PDM, Padepokan Hisbul wathon) sayang sekali tidak bisa bersatu mereka memiliki calon sendiri-sendiri sehingga sulit memenangkan pertarungan contohnya : Anwar, Rofiq Awali lebih memilih Ahmad Rofiq - Eki, Sobri, Zainuddin, mungkin Zainal memilih Gunawan. Haryono, Qosdus lebih *mensupport* Piet Khaidir, sementara Basti Teteng lebih memilih dan menjadi tim sukses Pantja.



Arek Malang : mengumpulkan Calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah

2. Kegagalan Kepemimpinan PP Pemuda Muhammadiyah Periode 2006 – 2010

Keberhasilan suatu kepemimpinan di Pemuda Muhammadiyah dalam satu periode diukur dari banyak segi antara lain : (a). Kemampuan melakukan konsolidasi pimpinan. (b). Kemampuan melakukan konsolidasi organisasi. (c). Kemampuan melaksanakan program kerja hasil muktamar. (d). Kemampuan menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak eksternal. (e). Kemampuan melakukan perkaderan. (f). Kemampuan melakukan sirkulasi elite secara damai melalui muktamar.

Kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah periode 2006 -2010 yang dipimpin oleh Izzul Muslimin dalam berbagai konteks cukup berhasil dalam mengemban amanah sebagai Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah hasil muktamar ke XIII di Balikpapan, namun dalam melakukan sirkulasi elite kurang berhasil hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa orang pada periode Izzul ini yang ngotot ingin tampil lagi menjadi ketua dan formatur padahal mereka telah menjadi pimpinan pusat selama dua periode bahkan lebih - antara lain seperti : Gunawan, Ahmad Rofiq, Makmun Murod, Piet Haidir dan lain-lain. Dengan keinginan tampil lagi dalam periode ini sebetulnya mereka menghalangi tampilnya kader-kader muda yang ingin menjadi penerus kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah. Padahal Mantan Ketua pemuda Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari mengingatkan bahwa :” “Perkaderan Pemuda Muhammadiyah jangan terlalu lama, apabila telah menjadi pimpinan satu periode selekasnya mereka terjun dilapangan lain agar mampu mengejawantahkan nilai-nilai Muhammadiyah.

Disamping itu jika terlalu lama bisa menghambat proses perkaderan berikutnya”.
(diskusi dalam temu alumni, 23 Mei 2010)

Muktamar sebetulnya juga proses sirkulasi elite ditubuh kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah, jika kemudian muktamar gagal karena mengalami *deadlock* dalam menetapkan sistem pemilihan yang dipakai dasar untuk memilih ketua dan formatur – sebenarnya kegagalan tersebut adalah kegagalan kepemimpinan pemuda periode Izzul dan kawan-kawan. Muktamar Pemuda Muhammadiyah adalah penanda bahwa perguliran organisasi dan kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah diberbagai level seperti PWPM, PDPM, PCPM sampai ke ranting sedang dimulai - jika muktamar gagal dan harus dilanjutkan dengan Muktamar Luar Biasa 6 samai 8 bulan kemudian berarti ditingkat bawah juga terjadi kemandegan organisasi dan tertundanya sirkulasi elite selama kurang lebih satu tahun.

Dari Gambaran diatas nyatalah bahwa kegagalan Muktamar berarti juga kegagalan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2006 -2010 dibawah kepemimpinan Izzul Muslimin, terutama dalam sirkulasi elite di Pemuda Muhammadiyah di berbagai level pimpinan.

3. MLB : Jalan Penyelesaian Yang Tak Mungkin dihindari

Setelah gagal menyelesaikan muktamar usaha-usaha yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah adalah melakukan konsultasi pimpinan pusat bersama Ketua PWPM seluruh Indonesia yang difasilitasi oleh PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Pendekatan untuk mencari jalan tengah agar muktamar bisa diselesaikan nampaknya mengalami jalan buntu – 22 Ketua

PWPM menginginkan agar sistem pemilihan tetap seperti yang ditetapkan di

Tanwir III Ciloto tahun 2009, di media massa hal ini diberitakan bahwa :

*“Sebanyak 22 PW Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia tetap istiqomah mempertahankan mekanisme one vote one delegation (satu suara, satu delegasi) dalam memilih Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta besok. Insyallah, kami sudah buat pertemuan, istiqomah dengan hasil Tanwir Ciloto khusus untuk pemilihan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, one vote one delegation. Untuk pemilihan formatur, sesuai dengan konstitusi melibatkan pimpinan daerah. Bagaimana mekanisme teknisnya, tergantung kesepakatan besok,” jelas Ketua Umum PW Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau, Nirwan Anton Siregar kepada (**Rakyat Merdeka**, 28/5).*

PWPM yang tetap mempertahankan sistem pemilihan *one delegation one vote* adalah sebagai berikut :

*22 Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) itu, antara lain PWPM Sumatera Utara, PWPM Sumatera Barat, PWPM Riau, PWPM Kepulauan Riau, PWPM Jambi, PWPM Bengkulu, PWPM Bangka Belitung, PWPM Banten, PWPM Bali, PWPM Nusa Tenggara Barat, PWPM Nusa Tenggara Timur, PWPM Kalimantan Timur, PWPM Kalimantan Tengah, PWPM Kalimantan Barat, PWPM Sulawesi Tengah, PWPM Sulawesi Tenggara, PWPM Sulawesi Barat, PWPM Maluku Utara, PWPM Papua, dan PWPM Papua Barat (**Rakyat Merdeka**, 29-5-2010)*

Kegagalan muktamar tanggal 18 sd 23 Mei 2010 yang diikuti kegagalan dalam forum konsultasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, kandidat ketua umum, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah yang difasilitasi PP Muhammadiyah di Yogyakarta tanggal 29 Mei 2010 – kegagalan ini disebabkan karena kedua belah pihak tetap ngotot menggunakan sistem pemilihan yang berbeda yakni *one man one vote* atau *one delegation one vote*. Maka pemilihan ketua dan formatur pimpinan pusat Muhammadiyah harus diselesaikan melalui Muktamar Luar Biasa. MLB Pemuda Muhammadiyah ini sepertinya repetisi terhadap kejadian Organisasi Otonom lainnya di Muhammadiyah yakni DPP IMM periode 2000-an

dengan aktor yang hampir sama seperti : Gunawan, Ahmad Rofiq, Makmun Murod, Piet Khaidir dan lain-lain.

Dalam usaha untuk menyelesaikan muktamar PP Pemuda Muhammadiyah berkirim surat nomor :1.2/605/1431 tertanggal 14 Juli 2010 yang isinya permohonan persetujuan dan dan kebijakan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, adapun surat tersebut berisi lima hal penting berkenaan dengan muktamar dan muktamar luar biasa :

- 1). **Muktamar XIV Pemuda Muhammadiyah** tanggal 20-23 Mei 2010, telah memutuskan : Perubahan Anggaran Dasar (AD), Garis-Garis Besar Haluan Gerakan (GBHG), Progran dan struktur organisasi serta Rekomendasi. Yang belum terlaksana adalah Pemilihan Ketua umum dan formatur Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah karena perdebatan sistem pemilihan yang berlarut-larut.
- 2). **Keberadaan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2006-2010.**
“Pimpinan lama tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima jabatan” (pasal 33 ayat 3), karena itu kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah masih dibawa Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2006-2010 sampai terbentuk pimpinan baru.
- 3). **Muktamar Luar Biasa** Pemuda Muhammadiyah untuk pemilihan Ketua umum dan formatur Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2006-2010 bertanggungjawab dan berwenang menyelenggarakan permusyawaratan pemilihan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melalui Muktamar Luar Biasa.

4). **Sistem Pemilihan.** Sebagai jalan tengah dari perdebatan yang tak kunjung selesai, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah memutuskan bahwa : *Ketua umum dan anggota formatur Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dipilih oleh 1 orang peserta utusan Pimpinan Pusat, 1 orang peserta utusan Pimpinan Wilayah, 1 orang pesereta utusan Pimpinan Daerah*

5). **Musyawarah wilayah.** Musyawarah wilayah diselenggarakan setelah terbentuknya Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah hasil Muktamar Luar biasa.

Menanggapi surat tersebut diatas PP Muhammadiyah membalas surat Nomor :255/1.0/B/2010 perihal tentang Penyelesaian Muktamar XIV Pemuda Muhammadiyah yang isinya antara lain :

- 1). PP Muhammadiyah menyerahkan kepada PP Pemuda Muhammadiyah untuk menyelesaikan agenda-agenda muktamar XIV yang belum terlaksana sebagaimana mestinya.
- 2). Sesuai ART Muhammadiyah dan Kaidah Ortom, hasil-hasil permusyawaratan organisasi otonom, seperti perubahan AD?ART, tata tertib permusyawaratan, dan lain-lain harus mendapatkan persetujuan dari PP Muhammadiyah.
- 3). PP Muhammadiyah dapat menyetujui agenda muktamar XIV khususnya menyangkut sistem pemilihan ketua umum sebagaimana disebutkan dalam surat PP Pemuda Muhammadiyah No. 1.2/605/1413 dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pemuda Muhammadiyah.

Dengan adanya persetujuan PP Muhammadiyah tersebut diatas, lengkaplah dasar berpijak untuk dilaksanakan Muktamar Luar Biasa dalam rangka memilih ketua umum dan anggota formatur periode 2010-2014. MLB sendiri dilaksanakan

tanggal di Jakarta. Suasana MLB sangat kondusif, sejuk dan tidak ada kericuhan berbeda sama sekali dengan suasana muktamar - masing-masing kelompok saling bertenggang supaya MLB tidak bubar dan gagal lagi. Hasil pemilihan yang menggunakan sistem pemilihan : *one delegation one vote* berbasis daerah ini di menangkan oleh Saleh P Daulay, rincian perolehan suara sebagai berikut :

Saleh P Daulay	279	suara
Gunawan	73	suara
Ahmad Rofiq	48	suara
Piet Khaidir	31	suara
Pantja	1	suara
Jumlah	432	suara

Sementara formatur yang terpilih adalah sebagai berikut :

M Ihsan	215	suara
Aminuddin	212	suara
Edi Satria	207	suara
Rahinandani	202	suara
Anang Anas Azhar	202	suara
Panca Nurwahidin	201	suara
Dahnil Anzar S	196	suara
Zulkarnaen Nasution	196	suara
Haris Jumadi	191	suara
Sunawan	183	suara
Piet H Khaidir	170	suara

Dengan terpilihnya ketua umum dan anggota formatur selesailah seluruh agenda muktamar-selanjutnya apa agenda yang harus dilakukan selesai MLB, salah seorang kandidat ketua PP Pemuda Muhammadiyah - Ahmad Rofiqia mengatakan : “Setelah MLB kita akan menyelenggarakan tanwir untuk segera merevisi atau mengembalikan AD/ART Pemuda Muhammadiyah seperti Tanwir di Batam agar supaya secepatnya bisa digunakan untuk Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah Pemuda Muhammadiyah.

4. *One Delegation One Vote* berbasis Daerah : Jalan Tengah Penyelesaian MLB

Jika selama ini sistem pemilihan muktamar Pemuda Muhammadiyah menggunakan *one men one vote* untuk memilih ketua dan formatur dan berhasil mengantarkan kepengurusan Pemuda Muhammadiyah sampai pada Muktamar ke XIII sementara pada Muktamar ke XIV sistem pemilihan dirubah menjadi *one delegation one vote* berbasis wilayah untuk memilih ketua dan *one men one vote* untuk memilih formatur ternyata gagal memilih Pimpinan Pemuda Muhammadiyah. Maka dalam Muktamar Luar Biasa Pemuda Muhammadiyah sistem pemilihan untuk memilih ketua dan formatur menggunakan sistem *one delegation one vote* berbasis daerah artinya disamping Pimpinan pusat dan wilayah pimpinan daerah hanya memiliki satu hak suara dan yang model ini tidak pernah tercantum dalam AD/ART Pemuda Muhammadiyah. Perbandingan Sistem pemilihan di Pemuda Muhammadiyah dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 1

Perbandingan Sistem pemilihan dalam Muktamar Pemuda Muhammadiyah

(1) Sistem Pemilihan <i>One men one vote</i>	(2) Sistem Pemilihan <i>One delegation one vote</i> berbasis daerah	(3) Sistem Pemilihan <i>One men one vote</i> dipadukan dengan <i>one delegation one vote</i> berbasis wilayah
Dilaksanakan sampai muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIII di Samarinda tanggal 10-12 Juli 2006	Dilaksanakan dalam Muktamar Luar biasa Pemuda Muhammadiyah di Jakarta tanggal 30-31 Oktober 2010	Dicobakan di Muktamar ke XIV di Jakarta tanggal 19 -23 Mei 2010
Semua anggota muktamar memiliki hak untuk memilih ketua dan formatur	Semua anggota MLB memiliki hak untuk memilih ketua dan formatur meski terbatas sampai daerah yang diwakili satu orang	Semua anggota muktamar memiliki hak memilih formatur sementara ketua umum dipilih delegasi wilayah jumlahnya 33 delegasi dan 1 delegasi dari PPPM
Terdapat sinkronisasi antara pengaturan sistem pemilihan dalam Anggaran dasar dengan anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah	Tak tercantum dalam AD/ART Pemuda Muhammadiyah - yang dipakai adalah aturan darurat yang disepakati oleh PPPM dan disetujui oleh PP Muhammadiyah	Dissinkronisasi antara pengaturan sistem pemilihan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemuda Muhammadiyah
AD dan ART mudah diterjemahkan dalam tatib pemilihan	Aturan darurat hanya untuk menyelesaikan pemilihan ketua dan formatur yang tertunda dalam muktamar	AD dan ART sulit diterjemahkan dalam tatib pemilihan karena saling bertentangan
Yang memiliki hak suara dalam muktamar kurang lebih 1700 orang	Yang memiliki hak suara untuk memilih ketua dan formatur sekitar 432 orang	Yang memiliki hak suara untuk memilih formatur kurang lebih 1700 dan yang memiliki hak untuk memilih ketua 34 delegasi (1 delegasi PPPM dan 33 PWPM)
AD/ART Produk Tanwir I tahun 2007 di Batam	Aturan Darurat Produk PPPM untuk menyelesaikan Muktamar ke XIV melalui MLB yang di setujui oleh PP Muhammadiyah	AD/ART produk Tanwir III tahun 2009 di Ciloto

Deskripsi : diolah dari ketentuan AD/ART Pemuda Muhammadiyah

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut : (a). Meski mahal dan tidak sederhana sistem pemilihan *one men one vote* lebih bisa diterima dan rasanya sudah *given* yang memenuhi hasrat berdemokrasi Pemuda Muhammadiyah. (b). Sementara uji coba penggunaan sistem pemilihan terbaru : *one delegation one vote* berbasis wilayah yang digabungkan dengan model pemilihan *one men one vote* belum bisa diterima oleh muktamirin – karena sarat dengan kepentingan politis dan kemudian bikin ricuh muktamar yang akhirnya *deadlock*. (c). Sistem pemilihan *one delegation one vote* berbasis daerah hanya bisa digunakan untuk kondisi darurat – dan selanjutnya harus dirubah kembali seperti semula melalui tanwir. (d) sistem Pemilihan *one delegation one vote* berbasis daerah sebenarnya adalah jalan tengah dari kedua sistem diatas.

Meski aturan darurat bisa digunakan untuk menyelesaikan MLB, namun demikian aturan darurat MLB dan AD/ART hasil Tanwir III Ciloto 2009 tidak bisa diterapkan untuk muswil dan musda Pemuda Muhammadiyah. Ketika MLB peneliti menanyakan kepada kandidat ketua umum saudara Rofiq apa yang dilakukan setelah MLB selesai ia menjawab :” setelah selesai MLB dan terbentuk ketua umum dan formatur, kemudian terbentuk kepengurusan PP Pemuda Muhammadiyah segera PP PM mengadakan tanwir untuk menyelesaikan AD/ART, agar segera bisa digunakan dasar untuk muswil dan musda”. (komunikasi pribadi, 30 Oktober 2010). Jawa timur misalnya dalam musyawarah wilayah Pemuda Muhammadiyah menggunakan AD/ART hasil Tanwir I di Batam artinya dalam pemilihan ketua dan formatur- PWPM Jatim menggunakan sistem pemilihan *one men one vote*. Karena itu “pemaksaan” untuk menggunakan AD/ART hasil Tamwir

III Ciloto tahun 2009 dalam muktamar ke XIV - sebenarnya adalah usaha kandidat tertentu untuk memenangkan kontestasi dan bukan untuk menyederhanakan penyelenggaraan Muktamar. Ali Mu'thi, salah seorang kandidat ketua umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa timur ketika menjawab pertanyaan peneliti - AD/ART mana yang digunakan untuk musyawarah wilayah Jawa Timur, ia menjawab : "AD/ART versi Batam dan ini sudah disetujui oleh Saleh P Daulay ketua PP Pemuda Muhammadiyah". (komunikasi pribadi, 30-10-2010). Dalam SMS dilingkungan Pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur pada waktu itu beredar bahwa berkenaan dengan pelaksanaan Muswil Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah memfatwakan untuk menggunakan AD/ART versi Batam. Dalam konteks ini bisa dianalisis sebagai berikut : (a). Peneliti agak tercenung mendengar jawaban dan SMS yang beredar menjelang Muswil Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur - karena Saleh sebenarnya adalah salah seorang calon ketua yang ngotot untuk mengusung AD/ART Versi Ciloto – sementara dalam Muswil Jatim kenapa ia justru memberi fatwa menggunakan AD/ART versi Batam, jadi artinya selama ini penggunaan sistem pemilihan ketua umum Pemuda Muhammadiyah yang menggunakan *one delegation one vote* menurut AD/ART Versi Ciloto dalam Muktamar ke XIV sebenarnya hanya untuk memenangkan kontestasi. (b). Tentang Fatwa ketua umum dalam lingkungan Pemuda Muhammadiyah tidak dikenal apalagi berkenaan dengan penggunaan AD/ART dalam musyawarah wilayah Pemuda Muhammadiyah (c). forum yang representatif untuk meregulasikan ketentuan Pemuda Muhammadiyah itu adalah hasil keputusan tanwir atau produk

keputusan muktamar sementara fatwa ketua umum tidak dikenal bahkan mungkin menyalahi aturan main di Pemuda Muhammadiyah itu sendiri.

5. *Trust Eksternal Menurun*

Apa yang terjadi jika suatu organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah tidak mampu menyelesaikan dinamika internalnya sendiri, Jawabnya adalah : (a). Fihak eksternal seperti : pemerintah, parpol, LSM, dunia kerja dan lain sebagainya menjadi kurang percaya terhadap proses perkaderan di pemuda Muhammadiyah. (b). Mereka menganggap Pemuda Muhammadiyah tak memiliki kapasitas untuk menjadi pemasok politik riil di arena kebangsaan. (c). Pemuda Muhammadiyah termarginalisasi dalam pusaran politik kebangsaan karena mereka disibukkan oleh konflik internalnya sendiri yang mungkin sulit diselesaikan. (d). Pemuda Muhammadiyah tak dilibatkan dalam percaturan politik kebangsaan karena dianggap bisa menularkan virus konflik ke arena politik praktis.

Karena itu, untuk meretas jalan agar supaya Pemuda Muhammadiyah dapat dipercaya lagi oleh berbagai pihak – kepemimpinan harus segera terbentuk melalui Muktamar luar Biasa, sebab jika Pimpinan Pusat tidak segera terbentuk maka akan mengundang banyak persoalan antara lain : (a). Konsolidasi Pimpinan dan konsolidasi organisasi akan terbengkalai. (b). Reformasi dan sirkulasi elit Pemuda Muhammadiyah di berbagai tingkatan organisasi akan terganggu. (c). Kontinuitas proses perkaderan akan berjalan lamban dan tersendat-sendat. (d). Program pemberdayaan Pemuda Muhammadiyah tidak tertangani dengan baik.

Tidak mudah memang-mempertahan kepercayaan fihak eksternal terhadap Pemuda Muhammadiyah dibutuhkan kejelian dari semua pihak eksponen Pemuda

Muhammadiyah untuk mempertahankannya yakni dengan kerja-kerja yang konstruktif bagi kemajuan pemuda itu sendiri dan bagi kemajuan bangsa. Apa pentingnya kepercayaan hal ini bisa dideskripsikan sebagai berikut : (a). *Trust* sangat *urgen* bagi organisasi semacam Pemuda Muhammadiyah, karena dengan memiliki kepercayaan banyak pekerjaan bisa dilaksanakan secara bersama-sama. (b). Kepercayaan adalah modal untuk kerjasama antar lembaga antara Pemuda Muhammadiyah dengan lembaga lain. (c). Kepercayaan mengundang banyak simpati yang tentunya bisa digunakan untuk memfasilitasi organisasi. Sekarang ketika Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2010-2014 terbentuk, harapan untuk memulihkan kepercayaan pihak eksternal bisa dilakukan - minimal kesan bahwa Pemuda Muhammadiyah mampu mengatasi dinamika internalnya sendiri mulai tercipta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya *deadlock* pemilihan ketua umum dan formatur Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah adalah : *Pertama*, Kontestasi dan kandidasi di muktamar Pemuda Muhammadiyah terjadi seperti layaknya forum kongres partai politik, ricuh-gaduh dan akhirnya *deadlock*. *Kedua*, Pergantian sistem pemilihan dari *one men one vote* menjadi *one delegation one vote* peserta muktamar terutama Pimpinan Daerah merasa “tidak diberi kesempatan” untuk memilih ketua umum, dengan demikian sistem pemilihan baru tersebut mereduksi peran daerah dalam memilih Pimpinan (kurang aspiratif). *Ketiga*, Persoalan Jatidiri Pemuda Muhammadiyah yakni kemandirian dalam kandidasi dan kontestasi, artinya bagaimana Pemuda Muhammadiyah mampu menepis campurtangan pihak eksternal dalam pemilihan pimpinan.

Implikasi dari kemacetan pemilihan ketua umum dan formatur Pemuda Muhammadiyah adalah : *Pertama*, Muktamar bubar dan kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah periode 2010 – 2014 belum terbentuk. *Kedua*, Kegagalan Muktamar adalah pertanda kegagalan Kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah Periode 2006 - 2010. Dan kegagalan ini berarti tertundanya reformasi organisasi dan sirkulasi elite Pemuda Muhammadiyah dalam berbagai level selama antara setengah sampai setahun. *Ketiga*, Kegagalan Muktamar karena pergantian sistem pemilihan yang berlanjut tidak terpilihnya pimpinan harus diselesaikan melalui mekanisme MLB, suatu mekanisme yang baru kali ini selama 70 tahun eksistensi Pemuda Muhammadiyah dilaksanakan. *Keempat*, Mekanisme MLB dalam

menyelesaikan pemilihan ketua umum dan formatur Pemuda Muhammadiyah menggunakan ketentuan darurat yang sistem pemilihan menggunakan sistem *one delegation one vote* berbasis daerah, ketentuan mana merupakan jalan tengah antara sistem pemilihan *one men one vote* dengan *one delegation one vote*. Kelima, Dengan kegagalan muktamar sebenarnya *trust* pihak eksternal seperti kepercayaan dari : pemerintah, partai, LSM, dunia kerja terhadap kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah menjadi turun. Menyembuhkan dan menumbuhkan kepercayaan dengan cara segera terbentuk Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat.

B. Saran

Melihat dan mengetahui langsung akibat dari perubahan sistem pemilihan kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah dalam muktamar XIV tahun 2010 yang membuat Muktamar *deadlock*, peneliti menyarankan PP Pemuda Muhammadiyah kembali menggunakan AD/ART Pemuda Muhammadiyah versi Tanwir Batam daripada AD/ART Pemuda Muhammadiyah versi Ciloto. AD/ART versi Batam lebih memenuhi syarat untuk dipakai wahana berdemokrasi di Pemuda Muhammadiyah, karena melibatkan partisipasi anggota dan pimpinan dibawahnya untuk menentukan kepemimpinan dan kebijakan Pimpinan Pusat. Disamping itu legitimasi pimpinan pusat sangat kuat karena ketua dan formatur yang membentuk kepengurusan dipilih oleh peserta muktamar karena itu anggota dan pimpinan dibawahnya merasa memiliki pimpinan pusat. Dampak dari penggunaan AD/ART versi Tanwir Batam adalah Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah memiliki kedekatan psikologis yang sangat rapat dengan organ/anggota dibawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, dalam pengantar buku Bottomore yang diterjemahkan oleh Abdul Haris, 2006 : *Elite dan Masyarakat*, Akbar Tanjung Institute, Jakarta
- Hamidi, 2004, *Metode Penelitian kualitatif*, UMM Press, Malang
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002
- Manheim, Jarol B, dan C Rich, Richard C, 1981, *Empirical Political Analysis : Research Methods In Political Science*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Faisal, Sanapiah, 1999, *Format-Format Peneliteiten Sosial*, Raja Grafindo Persada ,Jakarta
- Hamidi, 2004, *Metode Peneliteiten kualitatif*, UMM Press, Malang
- Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elite : Suatu Bahasan Pengantar*, PLOD UGM, Yogyakarta
- Keller, Suzanne, 1995, *Penguasa dan Kelompok Elite : Peranan Elite –penentu dalam Masyarakat Modern*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Moleong, Lexy, 2002, *Metode Peneliteiten kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews, 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Kantaprawira, Rusadi, 2004, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Penerbit Sinar Baru Al Gesindo, Bandung
- Varma, SP, 2001, *Teori Politik Modern*, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada Jakarta

Sumber lain:

Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah.

Buku Panduan Muktamar XIV Pemuda Muhammadiyah, 05-09 Jumadilakhir 1431 H/19-23 Mei 2010. Melintas Satu Abad Muhammadiyah: Membumikan Spirit dan Etos Muhammadiyah untuk Terwujudnya Kemandirian Bangsa. Jakarta.

Buku Panduan Peserta Muktamar XIV Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur “Melintas satu Abad Muhammadiyah, Membumikan Spirit dan Etos

Muhammadiyah untuk Terwujudnya Kemandirian Bangsa”. Jakarta.

Buku saku Profil dan Visi – Misi calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2014, Gunawan Hidayat. Revitalisasi Peran Pemuda Muhammadiyah.

Buku saku Profil dan Visi – Misi calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2014, Piet H. Khaidir. Kembalikan Pemuda Muhammadiyah ke Khittahnya.

Buletin Kabar Arena. Edisi 1/1/XIV/10. Tanwir Bermuktamar dengan Nurani.

Demokrasi Ciloto sebuah perspektif Pemuda Muhammadiyah; Catatan kumul seorang aktifis oleh Sanusi Ramadhan – Uchy.

Keputusan Induk Tanwir III Pemuda Muhammadiyah Tahun 2009. Ciloto, 23 – 25 Sya’ban 1430 H/14-16 Agustus 2009 M.

Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2006-2010, Muktamar XIV Pemuda Muhammadiyah ,05 – 09 Jumadilakhir 1431 H/19 – 23 Mei 2010 M. Melintas satu Abad Muhammadiyah: Membumikan Spirit dan Etos Muhammadiyah untuk Terwujudnya Kemandirian Bangsa. Jakarta.

Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2002 – 2006. Muktamar XIII Pemuda Muhammadiyah. Samarida, 14 – 16 Jumadil Akhir 1427/10 – 12 Juli 2006 M.

Materi Muktamar XIV Pemuda Muhammadiyah, 05-09 Jumadilakhir 1431 H/19-23 Mei 2010 M. Melintas Satu Abad Muhammadiyah: Membumikan Spirit dan Etos Muhammadiyah untuk Terwujudnya Kemandirian Bangsa. Jakarta.

Salinan Surat PWPM Jateng, Nomor: 1.3/116/1431, Sifat Penting, Hal: Keberatan Tentang Sistem Pemilihan Ketua Umum/ Ketua Pimpinan Pemuda Muhammadiyah. Semarang, 16 R. Tsani 1431 H/01 April 2010.